

**PENGUATAN MODAL SOSIAL KELEMBAGAAN DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN  
DI JAWA TENGAH**

**Mursid Zuhri, Rachman Djamal, Eny Hari Widowati**  
*Balitbang Prov Jateng*

**ABSTRACT**

*This study aims to (a) study the role of social capital in poor fishing activities, (b) studying Social Network Community fishermen, (c) institutional study - institutions that are built primarily a fishing community empowerment and economic institutions (d) to formulate and develop a model description institutional development for the empowerment of the poor fishermen on the south coast and the northern coast of Central Java. The results showed that (a) natural capital (natural capital) in eleven villages of coastal and marine samples, the majority of formal education did not complete elementary school and low income. (c) a smooth interaction between authorities and unions supported the social relations based on ties of neighborhood, kinship, and religious (c) The villages that have the most powerful social capital is the village of Tasikagung, followed by the Village Klidang Lor, Celong Kedawung, Pasir and Karangduwur. In the rural communities that have a relatively strong social capital is likely to be high levels of public welfare and socio-economic transformation processes take place more quickly. (d) Implementation of the program have not been able to reach the poor, the more helpless; power transfer does not occur, because the program is more utilized by the community group that is more capable and influential; power transfer occurs only at the level of local institutions that are dominated by close circles of power, and relatively non-social learning occurs, because the program is more nuanced economic activity (f) the empowerment program in poverty reduction is influenced by the strength of social capital is raised by a number of values (composite) that form a network of mutual trust, mutual respect and mutual benefit. The recommendations can be given: (a) strengthening of social capital shame / self-esteem, empathy, honesty, trust, altruism, visionary and rational to be an important note: while the mover of material progress is hard work and diligent, frugal, devoted to innovation, appreciate the work performance, visionary, and rational. The second joint values, namely for the strengthening of social capital on the one hand and to drive advances or capital reinforcement material on the other hand, together (synergistically) dibutuhkan in the management of PEM, P3EMDN Rural sustainable. (b) the empowerment of rural people especially the poor fishermen through the strengthening of social capital needs to be placed within the framework of the transformation or the development of sustainable rural communities (c) the development of coastal areas must pay attention to social relations in the fishing community, so as not to lead to social polarization. (c) factor of the village leadership, and extension workers to be important for the sustainability of an empowerment program in providing guidance for economically productive fishing communities in the form of technical development and business management. (d) to "coaching" post-program by the competent agency; (e) the need to empower the poor through increased coordination among agencies to reduce poverty.*

**Keywords: Strengthening Social Capital, Poverty, Empowerment of Fishermen**

## PENDAHULUAN

Kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi, sepertinya merupakan perbedaan bawaan sumber daya fisik maupun sumber daya sosial (*endowmen*). Terbaikannya pembangunan sumber daya sosial akan menyebabkan lemahnya modal sosial, seperti lemah rasa percaya, jaringan kerja yang tidak efisien, lemahnya norma maupun hilangnya nilai-nilai bersama.

Menurut Putnam (1993), Fukuyama (1995) dan Rao (2001), perbedaan rasa saling percaya menjadi faktor penyebab adanya perbedaan pembangunan pada suatu wilayah. Selain itu rasa percaya juga merupakan komponen modal sosial yang dapat meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber kesejahteraan (Grootaert, 2001). Modal sosial merupakan salah satu syarat bagi tercapainya kesejahteraan rumah tangga, maupun kemakmuran masyarakat pada umumnya. Modal Sosial dapat dipandang sebagai sebuah jalinan kerja sama antar warga untuk menghasilkan tindakan kolektif dan tujuan bersama. Tentu dalam melaksanakan tindakan, sepertinya mempunyai nilai-nilai dan akar tradisi yang kuat dalam suatu komunitas dan kemudian dapat dilembagakan menjadi sebuah kebiasaan.

Diketahui bahwa masyarakat pedesaan di Jawa Tengah memiliki nilai-nilai sosial dan modal sosial yang mengatur pola dan semangat hidup yang di dasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, dan saling menolong diantara anggota kelompok masyarakat. Di Jawa Tengah gotong royong, tolong menolong di tingkatan praksis dapat dilihat pada bentuk kegiatan masyarakat seperti halnya kegiatan keagamaan, kedukaan, perkawinan, dan aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia lainnya misalnya, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Dengan

adanya modal sosial atau kelembagaan ini, tentu masyarakat akan merasa lebih mudah dalam mengerjakan setiap aktivitasnya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Aktivitas lebih bersifat sukarela, siapa saja dapat mengikutinya.

Upaya Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, pada prinsipnya mempunyai dua tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan peran lembaga lokal menjadi lembaga yang mandiri sebagai pengelola program pasca program pemerintah dihentikan. Sementara itu kelembagaan yang dibangun oleh program pada umumnya bersifat horizontal, lemah secara vertikal, oleh karena itu persoalan modal sosial yang diindikasikan dalam sebuah kelembagaan yang hidup di masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan program.

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana *social capital* kelembagaan yang ada di masyarakat pedesaan terutama dalam penanggulangan kemiskinan di desa-desa nelayan maka diperlukan penelitian.

## BAHAN DAN METODE

Program pemberdayaan mencakup lima hal (Agusta, 2001), *pertama*, karakteristik penting pemberdayaan (*empowerment*), *Kedua*, berkaitan dengan tindakan individu yang perlu bersifat otonom agar mampu menghasilkan perubahan sosial, asumsi lain yang muncul dalam pendekatan pemberdayaan ialah, bahwa partisipasi merupakan tindakan sukarela. *Ketiga*, terdapat asumsi bahwa sebagai tindakan sukarela, partisipasi mengarah kepada suatu tindakan rasional. *Keempat*, terdapat asumsi yang berkaitan dengan program dan proyek, adalah sumberdaya yang langka. *Kelima*, asumsi bahwa kelompok dilihat sebagai tindakan individu yang membentuk konsensus.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997).

Menurut Max Neef dalam Zikrullah (2000), sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang perlu difahami oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap penanganan kemiskinan, yaitu (a) kemiskinan subsistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), (b) kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan; (d) kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas; (e) kemiskinan identitas, terbatasnya pembauran antara kelompok sosial, terfragmentasi; dan (f) kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas. Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun *civil community* yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif, dengan demikian basis modal sosial adalah *trust*, ideologi dan religi. Modal sosial dapat dicirikan dalam bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan komunitas. Ismail Serageldin memberikan klarifikasi modal sosial antara lain: (1) modal sosial dalam bentuk interaksi sosial

yang tahan lama tetapi hubungan searah seperti pengajaran dan perdagangan, sedang interaksi sosial yang hubungannya resiprokal (timbang balik) seperti jaringan sosial dan asosiasi. (2) Modal sosial dalam bentuk efek interaksi sosial lebih tahan lama dalam hubungan searah seperti kepercayaan, rasa hormat dan imitasi, sedang dalam bentuk hubungan timbal balik seperti gossip, reputasi, pooling, peranan sosial dan koordinasi, semua ini mengandung nilai ekonomi yang tinggi. Putnam (1995) mengartikan modal sosial sebagai “*features of social organization such as network, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit*”. Menurut Lesser (2000) modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama. Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

## HASIL

Kabupaten Kebumen, Brebes, Batang dan Rembang merupakan kabupaten yang memiliki daerah pantai dan laut cukup luas. Kondisi eksisting

sebagian modal alam (*natural capital*) pada sebelas desa sampel berupa pesisir dan lautan, sebagian besar usaha penangkapan ikan sebagai nelayan, kecuali itu hanya sebagian kecil lahan sawah, usaha pertanian di dua desa lainnya di pantai selatan.

Secara keseluruhan bisa dibuat penilaian bahwa dibanding enam desa sampel lainnya, kemajuan ekonomi pada masyarakat Desa Tasikagung paling tinggi, kemudian disusul Desa Kluwut, Desa Klidang Wetan, Pasir dan Kedawung, Tanjungsari dan Karang Duwur. Penguasaan alat produksi penangkapan ikan secara formal ini terlihat pada kepemilikan perahu oleh beberapa nelayan. Penguasaan alat produksi penangkapan ikan secara efektif terlihat pada nelayan yang menangkap ikan menggunakan perahu bantuan PEMP dan P3EMDN. Nelayan yang menguasai alat produksi penangkapan ikan secara formal umumnya disebut sebagai “juragan”, sedangkan nelayan yang bekerja pada nelayan juragan disebut sebagai “buruh”.

Hubungan antar lapisan sosial nelayan tidak berjarak dan tidak menimbulkan permusuhan di antara nelayan. Semua nelayan sama sekali tidak merasa keberatan untuk menerima dan bekerja sama dengan nelayan yang berasal dari lapisan yang berbeda. Penguasaan Aset Non Penangkapan mencakup : a) Penguasaan Alat Produksi Pertanian, Perikanan Budidaya, dan Peternakan. Perbedaan penguasaan lahan persawahan, penguasaan perikanan budidaya dan jumlah serta jenis ternak ternyata tidak menimbulkan kesenjangan di antara lapisan nelayan, b) Tingkat Pendapatan. Sebagian besar rumah tangga nelayan di desa-desa nelayan pantai utara maupun pantai selatan berpendapatan rendah dan masuk pada golongan ekonomi lemah. Penguasaan alat produksi penangkapan ikan bukan merupakan faktor penentu

terhadap tingkat pendapatan sebagian besar nelayan. Upaya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan pekerjaan serabutan, sebagai petani atau buruh tani, pedagang ikan, wirausaha atau warungan, pertukangan, mengirim anggota keluarga sebagai TKW/TKI. c) Keadaan Rumah dan Pekarangan. Penguasaan alat produksi penangkapan ikan ternyata bukan merupakan faktor penentu keadaan rumah dan isinya. Keadaan rumah tidak melambangkan identitas lapisan sosial nelayan. Rata-rata luas lahan pekarangan yang dikuasai oleh masing-masing lapisan nelayan hampir sama sehingga tidak ada kesenjangan di antara nelayan. Keadaan rumah dan isinya serta luas penguasaan lahan pekarangan bukan merupakan faktor penentu dalam pembentukan stratifikasi sosial nelayan.

## **PEMBAHASAN**

Peran Social Capital dan Institusi Lokal pada Aktivitas Nelayan Miskin di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah

### **Tata Nilai dan Modal Sosial**

Walaupun tidak semua tingkat kehidupan masyarakat di kesebelas desa sampel mengalami kemajuan, atau setidaknya tidaknya ada yang kemajuannya mengalami masa pasang surut, namun secara sosio-historis masyarakat di kesebelas desa sampel memiliki kekuatan untuk tetap bertahan hidup dan sekaligus menghindarkan diri dari proses pemunahan secara alami. Ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat pedesaan tidak sekedar adanya sekumpulan manusia yang secara fisik telah hidup bersama dalam kurun tertentu, melainkan ada “semangat” atau ruh sosial yang menjadi kekuatan pengikat kehidupan kolektif mereka.

### **Modal Sosial dan Pengelolaan Program**

Modal sosial di setiap desa sampel memiliki kekuatan yang berbeda. Desa

yang memiliki modal sosial paling kuat adalah Desa Tasikagung (4,01). Desa yang memiliki modal sosial yang tergolong antara sedang dan kuat adalah Klidang Lor (3,47) Desa Pasir, Dukuh Celong Desa

Kedawung, Desa Kluwut, Desa Karang Duwur dan Tanjungsari. Sedangkan desa yang memiliki modal sosial tergolong lemah (2,53) yaitu desa Prapak Lor, Prapak Kidul dan Klidang Wetan dan Pandangan.

Tabel 1. Kekuatan Modal Sosial Menurut Elemen Pembentuknya serta Kesebelas Desa Sampel.

Elemen Modal Sosial	Pasir	Kr. Duwur	Prapak Lor	Prapak Kidul	Kluwut	Klidang Wetan	Klidang Lor	Kedawung	Tasikagung	Tanjung sari	Pandangan
Pemerintahan	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	2,50	3,00	2,50	4,00	3,00	3,00
Kepemimpinan	3,63	3,50	3,00	3,50	3,50	2,00	4,00	2,00	4,25	4,00	3,50
Elit - Anak buah	3,50	3,38	3,50	3,50	3,50	2,25	4,14	2,00	3,00	3,00	3,88
Solidaritas	4,25	2,00	3,00	3,88	3,50	2,00	4,00	3,00	3,00	2,71	4,00
Gotongroyong	4,00	3,00	3,00	4,00	3,50	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,86
Manajemen Sosial	1,00	3,00	3,00	1,00	2,14	2,14	3,00	2,00	4,00	2,80	4,00
Jaringan Kerja	4,00	2,71	3,18	3,89	1,98	1,98	3,29	2,00	4,30	3,35	3,89

Keterangan 1 = sangat lemah 2 = lemah 3 = sedang 4 = kuat 5 = sangat kuat

Tabel 2. Kekuatan Kepemimpinan Masyarakat di Tingkat Dukuh dan Desa Menurut Komponen Pembentuknya.

Elemen Kepemimpinan	Pasir	Kr. Duwur	Prapak Lor	Prapak Kidul	Kluwut	Klidang Wetan	Klidang Lor	Kedawung	Tasikagung	Tanjung sari	Pandangan
Visi ke depan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Motivasi	3	3	2	3	3	2	3	4	4	3	2
Altruistik	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2
Inspiring	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2
Kemampuan khusus	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2
Komunikasi	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3
Solidarity maker	3	3	3	2	3	2	3	3	4	4	3
Rasional	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3
Demokratik	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3

Keterangan : 1 sangat lemah; 2 = lemah; 3 = sedang; 4 = kuat; 5 = sangat kuat

Terbentuknya modal sosial tidak bisa dipandang sebagai hasil penjumlahan sekumpulan (kekuatan) individu pembentuk system masyarakat, melainkan harus dipandang sebagai terbentuknya jaringan kerja sama yang dinamik dan terorganisir

### Kemiskinan dan Pengelolaan Program

Keterbelakangan masyarakat pedesaan terkait erat dengan lemahnya modal sosial. Kemiskinan merupakan bentuk paling akhir terjadinya kerusakan lingkungan dan lemahnya modal sosial di pedesaan.

Terdapat hubungan erat antara kuatnya modal sosial yang dipunyai satu masyarakat dengan kemampuan mengatasi

kemiskinan dan kemampuan mengelola program pemberdayaan. Dengan kuatnya modal sosial paling tidak harapan dipenuhinya tujuan pembangunan pedesaan berkelanjutan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar atau keadilan sosial, relatif mudah diatasi.

### Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat di daerah nelayan dapat dilihat dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat dicapai. Jika kemampuan menyekolahkan anak hingga SMP ditambahkan sebagai ukuran, maka > 70 persen penduduk di kesebelas desa contoh berada dibawah garis kemiskinan.

### Kerangka Penguatan Modal Sosial

Ada tiga aspek yang menunjukkan penguatan modal sosial yaitu: terbentuknya kerjasama dan solidaritas (“kohesivitas”), perluasan jaringan kerja dan peningkatan daya saing kolektif secara berkelanjutan. Di lapangan teramati bahwa ketiga kekuatan modal sosial tersebut dibangkitkan oleh sejumlah tata nilai (komposit) yang membentuk jaringan *mutual trust*, *mutual respect* dan *mutual benefit*. Nilai-nilai rasa malu atau harga diri, empati, kejujuran, amanah dan altruisme merupakan komponen modal sosial yang strategis. Nilai-nilai pembentuk modal sosial lainnya, seperti kerja keras, kerajinan, hemat, gandrung inovasi, menghargai prestasi, ber-visi ke depan, rasional sangat penting untuk menciptakan kemajuan atau pertumbuhan (ekonomi) pada budaya material; namun tidak mencukupi untuk menciptakan kerangka penguatan modal

sosial kelembagaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat di daerah nelayan.

Penguatan modal sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan di pedesaan nampaknya tidak terbatas pada kelembagaan, namun perlu juga terhadap modal sosial yang lain. Pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara berkelanjutan tidak cukup didasarkan pada pemberian bantuan material berdasar semangat belas kasihan (“*caritas*”) atau pengembangan system usaha atau produksi berbasis sumberdaya alam yang tersedia (laut) saja, melainkan harus juga mempertimbangkan penguatan semangat kerja kolektif dan menghormati sumberdaya (agro ekosistem) sebagai milik bersama.

Tabel 3. Model Hubungan antara Tingkat Masyarakat, Dimensi Waktu dan Elemen Modal Sosial dan Transformasi Sosial di Pedesaan

Dimensi Waktu	Elemen yang diubah menurut tingkat masyarakat (level of society) Dalam proses penguatan modal sosial di pedesaan		
	Mikro Individu – Kel Kecil	Meso (Kel. Kecil – Desa/Dukuh)	Makro (Masyarakat Tk.Kecamatan)
Jangka pendek	Tipe 1 Kompetensi SDM (1) Sikap dan tindakan (2) Tata Nilai	Tipe 3 (1) Tata nilai (normative) (2) Administratif dan manajemen sosial	Tipe 5 (1) Inovasi – inovasi dan (2) Revolusi dan kepemimpinan
Jangka Panjang	Tipe 2 Siklus kebiasaan dan gaya hidup individual/ keluarga kelompok kecil	Tipe 4 Tatanilai (kolektif), kepemimpinan, solidaritas, struktur dan organisasi sosial	Tipe 6 Evolusi modal sosial/ dan sosio budaya secara menyeluruh

Keterangan: Model dikembangkan dari pemikiran Zaltman and Duncan (1977)

Kelemahan utama pemberdayaan masyarakat pedesaan selama ini karena terlalu menekankan pada penguatan modal prasarana, penggunaan jaringan organisasi keproyekan dan pemerintahan yang

bersifat sentralistik, *top-down*, dan monolitik.

Tabel 3 menggambarkan kerangka atau model penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan dalam

rangka penanggulangan kemiskinan yang dianggap sesuai adalah yang mengacu pada Tipe 6. Hanya saja untuk mencapai Tipe 6 perlu ditempuh langkah-langkah Tipe 3 dan Tipe 4 yang dicirikan oleh pentingnya memperkuat modal sosial melalui kekuatan kelompok kecil pada masyarakat tingkat desa dan lebih kecil lagi tingkat dukuh. Langkah yang ditempuh Tipe 1 dan Tipe 2 dinilai akan banyak menyita tenaga dan biaya, yang hasilnya diperkirakan tidak bisa memperkuat modal sosial termasuk didalamnya kelembagaan di tingkat desa secara langsung. Dalam kaitan ini peran pemerintah seyogyanya dipandang sebagai representasi campur tangan publik untuk memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan masyarakat banyak pedesaan.

## SIMPULAN

Nelayan di Desa sampel sebagian besar berpendidikan formal tidak tamat Dasar (SD) dan berpendapatan rendah. Hubungan sosial nelayan berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan keagamaan masih kuat. Berbagai upacara keagamaan yang didasarkan atas tradisi Islam setempat, seperti *tahlilan*, *kenduren*, *ruwahan*, dan pengajian masih dilakukan pada saat-saat tertentu. Stratifikasi sosial nelayan didasarkan atas kriteria obyektif (penguasaan alat produksi penangkapan, penguasaan lahan pertanian, dan usia) dan subyektif (persepsi nelayan). Nelayan berdasarkan penguasaan alat produksi penangkapan terbagi menjadi 2 strata, yaitu nelayan yang menguasai alat produksi penangkapan (juragan) dan yang tidak menguasai (buruh). Nelayan berdasarkan penguasaan lahan pertanian tidak ada strata, karena nelayan hanya menguasai lahan rerata 1,5 *iring* (2500 m<sup>2</sup>). Nelayan yang berusia di atas 30 tahun mayoritas merupakan nelayan jaring *eret* dan nelayan sungai, sedangkan nelayan yang berusia di bawah 30 tahun mayoritas

merupakan nelayan perahu motor tempel. Nelayan berdasarkan kriteria subyektif terbagi menjadi 2 strata, yaitu nelayan berstrata tinggi apabila menguasai lahan luas, ternak yang banyak, dan atau berjasa di masyarakat dan sebaliknya untuk nelayan berstrata rendah. Nelayan bekerja secara individual sebelum adanya perahu motor tempel. Introduksi perahu motor tempel merubah hubungan kerja di antara nelayan, yaitu nelayan menangkap ikan di laut secara berkelompok (2-3 orang per perahu), dengan pembagian kerja yang tidak ketat antara tekong dan buruh. Desa yang memiliki modal sosial yang paling kuat adalah Desa Tasikagung (PEMP), kemudian disusul Desa Klidang Lor (PINNES), Celong Kedawung, Pasir dan Karang Duwur. Pada masyarakat desa yang memiliki modal sosial yang relatif kuat maka tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung tinggi dan proses transformasi sosial-ekonominya berlangsung lebih cepat. Program pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengelolaan PEMP, P3EMDN selama ini masih lebih menekankan pada pemberian bantuan material, dan kurang pada penguatan modal sosial setempat. Berkembangnya kegiatan ekonomi dan pengelolaan bantuan program setempat lebih dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat mengalokasikan sumberdaya keluarga dan mengelola tata nilainya untuk memperkuat modal sosialnya dari pada besarnya bantuan material dan pengetahuan teknologis yang diterima nelayan melalui keorganisasian proyek atau pemerintahan desa. Desa yang memiliki modal sosial yang paling kuat adalah Desa Tasikagung (PEMP), kemudian disusul Desa Kluwut (Program Departemen Kelautan dan Perikanan), Desa Klidang Lor (PINNES) Desa Pasir (Program Pusat). Pada masyarakat desa yang memiliki modal sosial yang relatif kuat maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya cenderung tinggi dan

proses transformasi sosial ekonominya berlangsung lebih cepat. Beberapa indikator modal sosial dalam pengelolaan program pemberayaan PEMP dan P3EMDN secara berkelanjutan adalah terletak pada kuat atau lemahnya solidaritas, manajemen sosial, keorganisasian jaringan kerja, struktur

sosial dan kegotongroyongan masyarakat setempat. Modal sosial relatif tajam bisa diamati di tingkat masyarakat kecil atau dukuh. Jalanan *mutual trust*, *mutual respect* dan *mutual benefit*, masih ditemukan pada masyarakat dukuh; namun jalinan ini mulai memudar pada masyarakat pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I, 2000 “Asumsi-asumsi Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Indonesia”, *dalam* Mimbar Sosek Th. 12 No. 3 April
- Andriyan, A., 2005. *Strategi Adaptasi dan Hubungan Sosial Nelayan Kampung Pesisir Kelurahan Panjunan Kota Cirebon*. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Cox *Poverty alleviation programs in the Asia-Pacific Region*, Seminar, 3 rd March, 2004 Jakarta
- Dasgupta, P. 1997. *Social Capital and Economic Performance*. Washinton DC. The World Bank.
- Colleta, Nat J dan Michelle LC. 2000. *Violent Conflict and The Transformation of Social Capital*. Washinton DC. World Bank.
- Fukuyama, F. 1997. *Social Capital*. George Mason University; Institute of Public Policy.
- Fukuyama, Francis (1995), *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, New York: theFree Press
- Fukuyama, Francis (1999), “Social Capital and Civil Society” makalah yang disampaikan pada the IMF
- Grootaert, C (1997) ‘Social Capital: The missing link?, in *Expanding the Measure of Wealth: Indicators of Environmentally Sustainable Development*, Washington : World Bank, *Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs*, Series No. 17, June, pp. 77 – 93
- Grootaert, Cristiaan (1999) “Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia”, World Bank Working Paper, unpublished
- Ife, Jim (1995). *Community development Creating community alternatives- vision, analysis and practice*, Australia Longman Pty Ltd
- Israel, Arturo. 1990. *Pengembangan Kelembagaan; Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Jakarta. LP3ES.
- Killerby, Paul. *Social Capital, Participation and Sustainable Development in International Community Development Conference on April 2003*. Rotorda. New Zealand.
- Narayan, D. 1999. *Bonds and Bridges; Social Capital and Poverty*. Washington DC. World Bank.
- Putnam, Robert D., 1993, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton, New Jersey: Princenton University Press).
- Pranarka, A.M.W. & Moelyarto, Vindyandika (1996), *Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, konsep, dan implementasi*, Jakarta, CSIS

- Pranaji, Tri Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam pengelolaan Agroekosistem Lahan kering
- Payne, Malcolm (1997) *Modern social work theory*. Second edition London: MacMiillan Press Ltd.
- Pretty, J. 2003 Social capital and Connectedness: Issues and Implikation for Agriculture, Rural Development and Natural Resource Management in ACP Countries. CTA Working Ducument Number 8032 The ACP-EU Tehnical Centre for Agricultural an Rural Cooperation (CTA)
- Saeful Rachmad, Memupuk Institusi local dan Modal Sosial dalam Kehidupan Masyarakat, <http://akhmadsudrajat.com/2008>
- Rudy S. Rivai Pengembangan Modal Spasial Masyarakat dalam upaya membangun Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Miskin, Dep Pertanian, 2006
- Sutrisno, Loekman (1997) *Kemiskinan, perempuan, pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius
- Syahyuti, Pengembangan Modal Sosial Masyarakat dalam upaya membangun Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Miskin, Dep Pertanian, 2006
- Uphoff, Norman. 1986. Local Instutional Development; An Alatical Sourcebook. West Hartford. Kumarian Press
- Koentjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan (Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial)*. Humaniora Utama Press. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan)*. LKiS. Yogyakarta.
- Masyhuri. 1996. *Menyisir pantai Utara*. Yayasan Pustaka Nusatama. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal (Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan)*. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.